

SALINAN

K E P U T U S A N  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan  
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum  
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 003f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
  - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    1. No. 73/M tahun 1972;
    2. No. 11 tahun 1974;
    3. No. 40 tahun 1974;
    4. No. 45 tahun 1974;
    5. No. 12 tahun 1977;
    6. No. 59/M tahun 1979;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    1. tanggal 17 Januari 1975 No. 000f/U/1975;
    2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
    3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-180/I/MENPAN/2/79.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal

t.t.l.

( T. Umar Ali )

SALINAN Keputusan ini disampaikan .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. Dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua DP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan DP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPLENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kab. Karang-anyar Surakarta	46.	ST Neg. I Colomadu	Jl. Colomadu 1 Pos Kartosuro	SMP Neg. II Colomadu	Jl. Colomadu 1 Pos Kartosuro	Surakarta		
	47.	ST Neg. II Colomadu	Ngadirejo Kec. Colomadu	SMP Neg. III Colomadu	Ngadirejo Kec. Colomadu	Surakarta		
	48.	ST Neg. II Karanganyar	Kec. Ngargoyoso Karanganyar Surakarta	SMP Neg. Ngargoyoso	Kec. Ngargoyoso Karanganyar Surakarta	Surakarta		
Kab. Sukoharjo	49.	SMEP Neg. Kartosuro	Desa Pabelan Kartosuro	SMP Neg. II Kartosuro Sukoharjo	Desa Pabelan Kartosuro	Surakarta		
	50.	SMEP Neg. Nguter	Jl. Raya Nguter Sukoharjo	SMP Neg. Nguter	Jl. Raya Nguter Sukoharjo	Surakarta		
	51.	SMEP Neg. Weru	Kec. Weru Sukoharjo	SMP Neg. Weru	Kec. Weru Sukoharjo	Surakarta		
	52.	SMEP Neg. Tawang Sari	Kec. Tawang Sari Sukoharjo	SMP Neg. Tawang Sari	Kec. Tawang Sari Sukoharjo	Surakarta		
	53.	ST Neg. I Kartosuro	Kartosuro Sukoharjo	SMP Neg. III Kartosuro Sukoharjo	Kartosuro Sukoharjo	Surakarta		
	54.	ST Neg. II Kartosuro	Jl. Alun-alun Kartosuro	SMP Neg. Daki	Kec. Daki Sukoharjo	Surakarta		